

GERAKAN NON BLOK DALAM MASA KEPEMIMPINAN INDONESIA 1992 -1995

NINGRUM NATASYA

**Fakultas Hukum
Universitas Sumatera Utara**

BAB I PENDAHULUAN

Politik non blok atau non alignment setelah Perang Dunia ke II, dimana ketika situasi politik internasional ditandai dengan adanya perundingan antar blok barat dan blok timur ditengah tengah perang dinginnya paham itu berkembanglah gagasan yang terwujud menjadikan Gerakan Non Blok ataupun Non Alignment Movement.

Pengejawantahannya yang pertama adalah Konferensi Tingkat Tinggi Non Blok di Beograd, Yugoslavia 1-6 September 1961.

Gerakan Non Blok ini juga bertujuan untuk mewujudkan perdamaian dunia berdasarkan pelaksanaan universal dari prinsip-prinsip hidup berdampingan secara damai, menentang imperialisme, kolonialisme, neokolomalisme, perbedaan warna kulit termasuk zionisme dan segala bentuk ekspansi, dominasi dan pemusatan kekuasaan.

Sedangkan beberapa tujuan lainnya adalah sebagai berikut yang mana memajukan usaha kearah perdamaian dunia dan hidup berdampingan secara damai dengan jalan memperkokoh peranan PBB menjadi alat yang lebih efektif bagi usaha-usaha perdamaian dunia, menyelesaikan persengketaan internasional diantara negara-negara anggotanya secara damai dan juga mengusahakan tercapainya pelucutan senjata secara umum dan menyeluruh di bawah pengawasan internasional yang efektif.

Dalam perjalanan sampai dengan sekarang ini Gerakan Non Blok telah melakukan 10 KTT. Tiap KTT mempunyai warna dan ciri sendiri-sendiri. Dari warna dan ciri tersebut dapat diketahui partisipasi Gerakan Non Blok dalam turut memecahkan persoalan-persoalan dunia dengan tetap mengadakan konsolidasi terhadap tubuh Gerakan agar tetap mengadakan atau agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dan tujuan pokok Non Blok.

Bab II PERMASALAHAN

Gerakan Non Blok dalam Kepemimpinan Indonesia mulai tahun 1992 sampai dengan tahun 1995 dan bagaimana hasil dan tindakan lanjut (prospek tindak lanjut)

BAB III PEMBAHASAN

A. Sejarah Lahirnya Gerakan Non Blok

Gerakan Non Blok pertama sekali dicetuskan pada awal tahun 60-an, yang merupakan tekad dari negara-negara merdeka dalam melancarkan aksi politiknya dalam menghadapi situasi dunia yang ditandai dengan memuncaknya perang dingin antara Blok Barat dan Blok Timur.

Konferensi Asia Afrika di Bandung tanggal 18 April 1955 yang telah menelorkan semangat Bandung, yang berintikan perdamaian, kemerdekaan, kerjasama Internasional untuk kepentingan bersama dan hidup berdampingan

secara damai adalah merupakan tonggak perjuangan bangsa-bangsa yang dijajah oleh Barat dari pelbagai belahan dunia.

Para pemimpin besar dunia Nasser (Mesir), Tito (Yugoslavia), Nehru (India), Kwame Nkrumah (Ghana), dan Sukarno (INDONESIA) di Majelis Umum PBB ke-25 tahun 1960 menyuatkan resolusi untuk meredakan ketegangan Timur dan Barat dan diadakannya perundingan antara 2 musuh bebuyutan itu serta mencegah konflik terbuka.

Resolusi ini berlanjut dalam bentuk gerakan yang tidak mau terlibat atau terikat oleh dua blok tersebut. Tiga tokoh utama pendiri Non Blok yaitu: Tito, Nehru, Nasser telah menyiapkan sejak awal 1950, Bung Karno dan Nkrumah disebut pula sebagai pendiri gerakan itu.

Prakarsa-prakarsa lima kepala negara yang lebih dikenal dengan "The Inisiatif Five" yang mengawali sejarah timbulnya sejarah GNB yang ada sampai sekarang ini.

B. Pengelompokan Dalam Gerakan Non Blok

Berdasarkan sikap dan posisi yang nampak dalam berbagai pertemuan Non Blok, secara garis besarnya terdapat 3 pengelompokan di dalam Gerakan Non Blok, yaitu :

- 1). Kelompok MAINSTREAM, yaitu kelompok yang ingin tetap mempertahankan prinsip-prinsip dasar dan tujuan Gerakan Non Blok, dan yang termasuk dalam kelompok ini adalah antara lain ; INDONESIA, ARGENTINA, INDIA, BANGLADESH, GABON, PAKISTAN, SRILANKA, SENEGAL, TUNISIA, SAUDI ARABIA.
- 2). Kelompok EKSTRIM KIRI, yaitu dalam kelompok ini termasuk juga negara yang mempunyai kerjasama di berbagai bidang dengan UNI SOVYET melalui perjanjian bilateral (Treaty on Friendship and Cooperation) yang termasuk dalam kelompok ini antara lain CUBA, AFGANISTAN, ANGOLA, VIETNAM dan LIBYA.
- 3). Kelompok EKSTRIM KANAN, yaitu yang termasuk dalam kelompok ini antara lain MESIR, SINGAPURA, ZAIRE.

Sebelum kita membicarakan tentang apa saja yang telah dihasilkan selama Kepemimpinan Indonesia yang diketuai oleh Bapak Presiden Soeharto ada baiknya dipaparkan sedikit tentang KTT GNB yang ke-10 yang diselenggarakan tanggal 1-6 September 1992 yang lalu.

KTT GNB X yang dibuka secara resmi oleh Presiden Soeharto sebagai Ketua GNB tanggal 1-6 September 1992, yang diikuti oleh 108 negara anggotanya mengusulkan kerjasama, alih pengalaman dan pengetahuan, dalam tiga hal yaitu : pangan, kependudukan dan pengurangan beban pembayaran utang luar negeri. Tiga hal ini adalah merupakan hal yang penting dan yang paling dulu harus ditangani secara serius.

Pesan Jakarta adalah merupakan hasil KTT Gerakan Non Blok di Jakarta tanggal 1-6 September 1992. Pesan Jakarta ini terdiri dari 27 butir yang terdiri dari berbagai masalah seperti: Ekonomi, Politik, Sosial budaya, Ilmu Pengetahuan dan lain-lain dan beberapa diantaranya adalah :

- GNB memberikan kontribusi untuk menimbulkan perbaikan bagi iklim politik Internasional.
- GNB menghormati kedaulatan suatu negara, mentaati sepenuhnya prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain.
- GNB ingin agar Israel mundur dari seluruh wilayah Arab yang didudukinya termasuk Yerusalem.
- GNB menyuarakan baik kemajuan dalam pembatasan senjata konvensional dan nuklir.

- GNB menyerukan dipercepatnya pembangunan negara-negara berkembang berdasarkan stabilitas, pertumbuhan dan distribusi.
- GNB melihat kerjasama Selatan-Selatan penting untuk memajukan pembangunan sendiri dan mengurangi ketergantungan kepada Utara.
- GNB menekankan kembali hak asasi manusia dan kebebasan fundamental kebenaran yang universal.
- GNB menyatakan komitmennya konferensi dunia mengenai wanita 1995 -Aksi persamaan pembangunan dan perdamaian.
- GNB yakin integrasi wanita yang sama dan sepenuhnya dalam proses pembangunan pada segala tingkatan merupakan sasaran GNB.
- GNB memproyeksikan gerakan sebagai komponen konstruktif bersemangat dan sepenuhnya saling tergantung pada hubungan Internasional yang utama.

C. Peranan Kepemimpinan Indonesia dan Hasil-hasilnya

Dalam hal ini yang akan dijabarkan adalah yang mana Presiden Soeharto sebagai Ketua GNB dan apa saja yang telah dihasilkannya sampai sekarang ini mulai dari berakhirnya KTT GNB ke-10 tanggal 1-6 September 1992 lalu.

Menurut Kepala Negara Bapak Presiden Soeharto bahwa GNB dalam era pasca perang dingin masih terus relevan, maka beliau selaku Ketua GNB telah memperlihatkan usaha dan niat yang sungguh-sungguh untuk menemukan kembali arah GNB dan mengembangkan melalui usaha nyata –Kerjasama Selatan-Selatan –Menghidupkan kembali dialog Utara -Selatan.

Dalam kaitannya dengan hal yang disebutkan terakhir, Presiden menegaskan, bahwa agar Selatan tidak dianggap hanya bisa "Menuntut", maka pendekatan lama yang cenderung konfrontatif akan diganti dengan pendekatan kemitraan. Kesungguhan Kepala Negara untuk terus menjaga momentum diperlihatkan juga dengan penegasan, bahwa hasil-hasil KTT GNB X tidak akan ditangani secara umum, tetapi akan ditangani secara khusus. Pengangkatan Nana Sutresna sebagai "Kepala Staf" GNB, juga Prof. Widjojo Nitisastro sebagai koordinator tim-tim ahli, serta empat Letjen (Purn) Sayidiman Suryohadiprodo, Achmad Thahir, Alamsyah Ratu Perwiranegara dan Hasnan Habib sebagai duta besar wilayah adalah bukti yang jelas adanya kesungguhan Indonesia dalam memimpin dan menyukseskan GNB.

Oleh karena itu kita dapat melihat hasil-hasil yang akan dicapai setelah KTT GNB X 1992 dalam kepemimpinan Indonesia dengan Bapak Presiden Soeharto sebagai Ketua GNB.

Banyak yang telah dihasilkan sampai sekarang ini sebagai contoh adalah :

1. Gerakan Non Blok putuskan untuk mengirim utusan Palestina ke negara-negara Arab adalah untuk langsung terlibat dalam negosiasi-negosiasi yang mendukung usaha Palestina memperoleh haknya kembali yang mana keputusan yang diambil oleh Ketua GNB -Presiden Soeharto mendapat dukungan dari Menlu Palestina Farouk Kaddoomi sesuai sidang Komite Palestina GNB di Bali yang dalam hal ini menurutnya keputusan tersebut menunjukkan dukungan Gerakan Non Blok kepada rakyat Palestina dalam memperoleh haknya kembali dan akan berusaha membuat warga Israel mundur dari kawasan yang diduduki.

Komite Palestina GNB terdiri dari Aljazair, India, Bangladesh, Senegal, Gambia, Zimbabwe, Palestina dan Indonesia, komisi GNB untuk Palestina diketuai oleh Indonesia.

2. Gerakan Non Blok ingin berdialog dengan Peserta KTT G7 di TOKYO.

Presiden Soeharto sebagai Ketua GNB dalam dialog tersebut sebenarnya ingin menyampaikan berbagai masalah terutama yang tercantum dalam PesanJakarta (the Jakarta Messages), dimana salah satu hasil KTT-GNB di Jakarta tahun 1992 adalah

negara negara GNB akan mengadakan kerjasama misalnya negara Afrika akan mengirimkan petani atau petugas Keluarga Berencana ke Indonesia untuk melakukan magang. Namun karena Indonesia dan negara Afrika itu tidak memiliki dana yang cukup untuk membiayai program magang ini, maka akan dicari negara ketiga terutama negara maju yang bersedia membiayai pengiriman petani Afrika ke Indonesia. Dialog negara maju dan berkembang yang disebut sebagai dialog Utara - Selatan.

Dialog yang diharapkan akan tercapai itu ternyata tidak dapat dicapai sehubungan dengan tidak diundangnya Presiden Soeharto sebagai ketua GNB dalam KTT G-7 di Tokyo. Sikap negara maju yang mengabaikan niat baik Gerakan Non Blok untuk menyampaikan suaranya dalam kesempatan KTT G-7 di Jepang disesalkan oleh pemerintah Republik Indonesia.

Apa yang hendak disampaikan adalah buah pikiran negara anggota GNB terhadap keadaan dunia saat ini, situasi dunia yang tengah dihadapi dan usulan terhadap upaya bersama yang dapat dijalin oleh negara maju maupun negara sedang berkembang. Kelompok G-7 dalam hal ini terdiri dari Inggris, Kanada, Perancis, Jerman, March 11, Italia, Jepang dan Amerika Serikat.

3. Upaya Penyelesaian Hutang Negara Negara Selatan

Beban hutang negara negara Non Blok adalah masalah yang cukup penting untuk dibahas dan dicari penyelesaiannya. Mengenai masalah beban hutang negara-negara dunia ketiga ini cukup banyak mendapat sorotan dan diharapkan agar dibawah kepemimpinan Indonesia, masalah hutang yang menjadi salah satu agenda utama KTT Non Blok ke X bisa diselesaikan dengan terobosan-terobosan yang cukup berarti.

Dan untuk mewujudkan hal ini Presiden Soeharto mengundang negara-negara untuk berbagi pengalaman dimana Indonesia sebagai negara penghutang pada negara negara lain dinilai oleh Bank Dunia dapat membayar hutangnya sesuai waktu yang telah ditentukan.

Presiden Soeharto juga kembali mengungkapkan pandangan-pandangannya yang telah diungkapkan pada saat menerima sejumlah kepala negara di New York, dimana Presiden Soeharto mengingatkan kembali negara maju untuk memenuhi komitmennya menyisihkan 0,7 % dari GNP mereka bagi membutuhkan negara berkembang. Namun sejauh ini baru sekitar 0,37 % yang telah diberikan. Dengan demikian masih ada kekurangan 0,3 -0,4 % atau sekitar 50 Milyard dollar Amerika dari keseluruhan komitmen yang mereka berikan .

Presiden Soeharto juga menekankan pentingnya kerjasama selatan-selatan, bukan hanya sekedar menyelesaikan masalah sosio ekonomi tetapi juga melalui kerjasama konkret antara selatan -selatan untuk memberi bobot dalam dialog dengan utara. Kepala negara mengingatkan negara maju yang disebut kelompok utara dan negara berkembang termasuk negara selatan saling membutuhkan antara lain karena nasib dan kepentingan mereka sangat terkait satu sama lainnya.

Negara selatan tidak akan dapat mencapai sasarannya dalam pembangunan bila negara utara tidak berusaha menciptakan lingkungan eksternal yang mendukung pembangunan di selatan. Namun dipihak lain negara utara dan negara industri maju akan mengalami kesulitan dalam mempertahankan pertumbuhan ekonominya tanpa adanya stabilitas dan pembangunan di selatan. Jika selatan sampai kehilangan pasar yang luas dan vital

Menurut presiden Soeharto cara bijaksana adalah kedua pihak harus menyadari saling ketergantungan antar mereka dan selanjutnya bersama sama menghasilkan cara pemecahan bersama dalam menghadapi tantangan tantangan berat dalam masa krisis sekarang ini.

4. Bantuan untuk Petani Afrika

Presiden Soeharto secara khusus mengundang Brunei untuk turut serta dalam kerjasama selatan-selatan. Dalam kerangka kerjasama ini, Indonesia secara konkret menawarkan untuk menukar pengalaman dalam upaya meningkatkan produk sokongan kepada negara-negara Afrika yang mengalami kelaparan dewasa ini.

Indonesia mengundang para petani negara Afrika itu untuk melihat secara langsung secara praktek ditengah-tengah petani Indonesia. Dalam hal ini Brunei diminta memberikan dana untuk membiayai perjalanan para petani Afrika itu ke Indonesia, karena baik negara-negara Afrika itu maupun Indonesia tidak mampu membiayai program ini.

Dengan demikian diharapkan negara-negara utara dapat merealisasikan kesanggupan mereka untuk memenuhi sasaran yang telah disepakati bagi pembangunan resmi dan Presiden Soeharto menegaskan yang harus dipahami setiap negara adalah kedaulatan menentukan sistem sosial ekonomi dan politik nasionalnya masing-masing.

5. Pidato pada KTT Pembangunan Sosial di Kopenhagen, Denmark

KTT yang diadakan oleh PBB di Kopenhagen telah memberikan kesempatan dan merupakan momentum yang tepat bagi Presiden Soeharto sebagai pemimpin Gerakan Non Blok dengan memberikan pidato pertama yang menyerukan kerjasama diantara negara maju dan negara berkembang untuk memperbaiki nasib orang miskin yang jumlahnya sekitar 1 Milyard didunia ini.

Pengalaman umumnya negara-negara anggota GNB bahwa sekalipun upaya-upaya mencapai pertumbuhan ekonomi merupakan hal yang penting tetapi hal itu bukanlah merupakan tujuan utama dari pembangunan, melainkan kebijakan pembangunan juga harus menempatkan manusianya sebagai pusat perhatiannya. Masalah kemiskinan dan pengangguran haruslah mendapat prioritas utama sebagai dapat saja menjadi salah satu penyebab instabilitas.

Masalah yang harus mendapat perhatian khusus adalah hutan luar negeri, sistem perdagangan bebas serta pengendalian jumlah penduduk khususnya juga masalah keamanan pangan di Afrika. GNB telah mencoba meringankan kemiskinan melalui berbagai cara seperti peningkatan produksi pangan dan dalam hal ini mengharap kerjasama maksimal dari PBB sebagai badan dunia untuk memainkan peranan yang lebih penting dengan mencoba mewujudkan tatanan Tata Dunia Baru dalam usaha memecahkan masalah keterbelakangan dan kemiskinan.

6. Pertemuan Informal Negara Berpenduduk Banyak

Ditengah-tengah KTT Pembangunan Sosial di Kopenhagen, Presiden Soeharto sebagai pemimpin GNB telah meluangkan waktu untuk mengadakan pertemuan informal dengan 9 negara yang memiliki penduduk terbanyak didunia yaitu, Indonesia, Bangladesh, Brazil, Cina, Mesir, India, Meksiko, Nigeria dan Pakistan. Pertemuan informal ke 9 negara berkembang tersebut membahas masalah pendidikan bagi semua (Education For All) yang diselenggarakan oleh Badan-Badan PBB yaitu UNESCO, UNICEF, UNFPA dan UNDP. Gerakan Non Blok memandang perlu bahwa pendidikan merupakan landasan penting bagi upaya meningkatkan kemajuan, kemakmuran dan kesejahteraan.

Program konkret dari pernyataan tersebut adalah dalam realisasinya mengadakan program wajib belajar seperti yang telah dicanangkan oleh pemerintah Indonesia. Sebagai tindak lanjut dari pertemuan informal ini akan dilanjutkan di Bali, bulan September yang akan datang.

7. Kunjungan Pemimpin Gerakan Non Blok ke Zagreb, Kroasia dan Sarajevo, Bosnia
Sesudah KTT Pembangunan Sosial di Kopenhagen, pemimpin GNB telah mengadakan kunjungan yang dinilai oleh PBB sekalipun sangat berani dan beresiko tinggi yaitu ke Kroasia dan Sarajevo yang tengah dilanda peperangan antar etnis. Setelah kunjungan resminya selama 2 hari di Zagreb, kemudian diikuti dengan kunjungan selama 6 jam ke Sarajevo, Bosnia. Dalam pernyataan selaku pemimpin GNB, presiden Soeharto telah menyuarakan pandangan GNB terhadap bekas salah satu negara pendiri GNB yaitu Yugoslavia terdahulu, yaitu bahwa tidak ada pihak yang dapat menyelesaikan pertikaian etnis diantara mereka kecuali oleh para pemimpin negara-negara kawasan bekas Yugoslavia sendiri. Gerakan Non Blok akan mencoba membantu semampu mungkin tanpa ikut campur secara langsung melalui jalan diplomatik yang syah dan sesuai dengan prinsip GNB itu sendiri. Secara moral kunjungan pemimpin GNB ini dianggap sebagai dorongan dan perhatian bahwa GNB sangat prihatin akan masalah yang berkepanjangan yang belum terselesaikan sampai sekarang.

D. Prospek dan Tindak Lanjutnya

Dalam prospek tindak lanjut ini dipertanyakan apakah Gerakan Non Blok akan diteruskan, karena pada satu sisi masalah pertentangan antara blokBarat dan blok Timur sudah berakhir.

Presiden Soeharto mengatakan "Selama Perdamaian Dunia terancam kemerdekaan bangsa berkembang, aspirasi rakyat terhambat dan ketidakadilan ekonomi masih berlanjut maka selam aitu juga GNB tetap berada digaris depan untuk berjuang menentangannya".

Bouthros-Ghali mengatakan gerakan Non Blok harus tetap ada walaupun telah usai dekolonisasi dan pendekatan timur barat yang diikuti lenyapnya blok persekutuan politik dan keamanan global. Non Blok harus tetap pada 5 prinsip politiknya yaitu:

- Tidak bersekutu dalam konteks konfrontasi timur barat.
- Bersekutu daa perjuangan arti kolonial
- Tidak terlibat dalam persekutuan militer multilateral
- Tidak terlibat dalam persekutuan militer bilateral dengan suatu negara adidaya
- Tidak memberi tempat pada suatu pangkalan militer suatu negara adidaya

Gerakan Non Blok juga jangan menghilangkan visi dan jangan disibukkan dengan pertentangan anggota dan tidak direpotkan oleh percekocokan tentang prioritas dan prinsip dasar GNB disejajarkan dengan wujud dan cita-cita luhur dari piagam PBB.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Gerakan Non Blok dalam kepemimpinan Indonesia yang diketuai oleh Presiden Soeharto telah memperlihatkan niat dan usaha yang sungguh-sungguh untuk menemukan kembali kearah Gerakan Non Blok yang seutuhnya dan berusaha mengembangkan usaha-usaha nyata seperti kerjasama selatan-selatan dan selain itu juga menghidupkan kembali dialog utara-selatan.

Untuk penyelesaian hutang negara-negara selatan yang dari waktu kewaktu jumlah semakin membesar dan semakin melilit, Indonesia sebagai negara pemimpin Gerakan Non Blok dihadapkan pada tantangan-tantangan yang cukup berat.

Penyebabnya tidak saja diakibatkan oleh kesulitan ekonomi negara-negara maju tetapi juga dengan semakin umumnya pola menjadikan uang sebagai komoditi.

Keduanya menjadikan dana dunia semakin terbatas dalam situasi seperti ini, mengingat jumlah negara selatan sendiri relatif banyak, berarti diantara mereka sendiri amat mungkin terjadi persainganketat karena masing-masing akan mendahulukan kepentingan nasionalnya.

Terdapat tendensi bahwa Gerakan Non Blok ini telah bergerak dari gerakan yang bersifat politis menuju gerakan yang bersifat mitra dan lebih terfokus semula yaitu menentang blok politis yang ada.

SARAN

Oleh karena itu sudah menjadi tugas kita untuk memikirkan lebih lanjut konsep-konsep yang telah dimajukan oleh Kepala Negara tentang masalah-masalah tersebut dengan penuh kearifan dan tanggung jawab kitalah untuk meneruskannya pada masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

1. Analisa, Harian Umum tanggal 13 Januari 1993, halaman 1
2. Analisa, Harian Umum tanggal 26 Januari 1993, halaman 1
3. Analisa, Harian Umum tanggal 11 Mei 1993, halaman 4
4. Analisa, Harian Umum tanggal 12 Mei 1993, halaman 4
5. Analisa, Harian Umum tanggal 28 Mei 1993, halaman 4
6. Kompas, Harian Umum tanggal 1 Oktober 1992, halaman 1
7. Kompas, Harian Umum tanggal 7 oktober 1992, halaman 1 & 4
8. Analisa, Harian Umum tanggal 9 Maret 1995
9. Kompas, Harian Umum tanggal 9 Maret 1995
10. Analisa, Harian Umum tanggal 11 Maret 1995
11. Kompas, Harian Umum tanggal 11 Maret 1995
12. Indonesia dan Organisasi International oleh Direktorat Organisasi Internasional, Deparlu tahun 1990